

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020



TENTANG  
PERSETUJUAN  
RANCANGAN PERUBAHAN KUA/ PPAS APBD  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**R E M B A N G**

---

**RISALAH**

**PERSETUJUAN**

**RANCANGAN PERUBAHAN KUA/ PPAS APBD  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 September 2020  
Waktu : 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
  2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020;
  3. Persetujuan Rancangan Perubahan KUA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020
  4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD;
  5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : **H. Bisri Cholil Laqouf**
  2. Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 41 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

**IX. JALANNYA RAPAT  
PIMPINAN RAPAT : H. Bisri Cholil Laqouf**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang,

Dan yang saya hormati pula

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, taufiq dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan dan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Amanat Pasal 114 ayat ( 1 ) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “Rapat Paripurna DPRD **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD ”.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 41 orang. Dengan demikian, keabsahan kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.07 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan dan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Amanat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dan pada Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Merujuk hal tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui surat Bupati tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 050/1709/2020 telah disampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Rembang berikut permintaan untuk pembahasannya. Selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Rembang melalui Badan Musyawarah, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dilakukan rapat



bersama dengan TAPD Kabupaten Rembang untuk menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020 dimaksud .

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Dengan memperhatikan jadwal dan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, selanjutnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Sekretaris Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA – PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Persetujuan Perubahan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
5. Penutup.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Kita masuk acara kedua, yaitu Laporan Sekretaris Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA – PPAS APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si disilahkan.

**===== PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR =====**

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si atas penyampaiannya.

➤ *( Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Perubahan KUA – PPAS APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir )*

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Demikian penyampaian laporan Sekretaris Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Apakah nantinya Rancangan Perubahan KUA-PPAS tersebut dapat diterima dan disetujui menjadi KUPA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, tergantung dari pengambilan keputusan anggota dalam rapat paripurna ini. Sehubungan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, maka saya minta kepada rekan-rekan anggota untuk lebih cermat dalam memberikan persetujuan. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah Rancangan Perubahan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran, dapat disetujui dan disepakati menjadi KUPA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ?”**

===== SETUJU =====

**Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )**

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota atas persetujuannya. Dari persetujuan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD diteruskan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang. Agar prosesi berjalan lancar, saya minta kepada sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi. Disilahkan.

**===== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD =====**

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Sebelum menutup acara rapat paripurna ini, saya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Rabu, 2 September 2020, disepakati perubahan jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 serta RAPBD Perubahan 2020 yang telah ditetapkan oleh Banmus DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Dengan mempertimbangkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyatakan agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, maka pada kesempatan ini saya meminta persetujuan Bapak dan Ibu anggota DPRD sekalian,

**“ Apakah Keputusan Badan Musyawarah tanggal 2 September 2020 yang merubah agenda kerja DPRD yang sudah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dapat disetujui ? ”**

===== SETUJU =====

**Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )**

Terima kasih.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Agenda dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, rekan-rekan Anggota, TAPD Kabupaten Rembang, Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan KUPA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.30 WIB rapat paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

**Sekian.**

*Wabilla Hitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Plt. KETUA ,



**H. BISRI CHOLIL LAQOUF**

 SEKRETARIS,



**Drs. DRUPODO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN  
PERUBAHAN KUA/ PPAS TAHUN 2020**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Perubahan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2020
- LAMPIRAN III : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ....6..... Tahun 2020 tentang Persetujuan Rancangan Perubahan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2020.

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TENTANG PERSETUJUAN KUPA/ PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020**  
**PUKUL : 11.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	SUGIHARTO	Anggota	1	
2	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	2	
3	SUMARDI	Anggota	3	
4	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	4	
5	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	5	
6	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	6	
7	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	7	
8	H. SUPADI	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10			10	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Pit. Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM )</b>			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH S F	Anggota	26	



NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>				
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27 ✓	
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
<b>FRAKSI DEMOKRAT HANURA</b>				
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
<b>FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</b>				
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	

Keterangan :

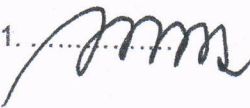
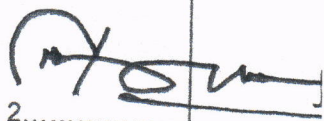
- 1 L : Ijin ✓
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

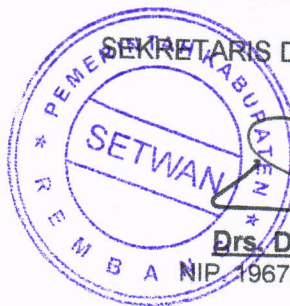


DAFTAR HADIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN KUPA/ PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020

HARI/TANGGAL : KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



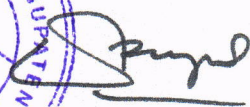
**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN KUPA/ PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

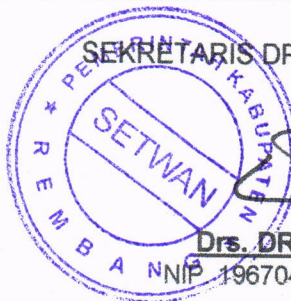
**HARI/TANGGAL : KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020**

**PUKUL : 11.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	1.....
2	.....	Asisten I Sekda	2.....
3	.....	Asisten II Sekda	3.....
4	.....	Asisten III Sekda	4.....
5	<i>NUR dny lmd</i> <i>Fahri S</i>	Ka. BPPKAD	5..... <i>[Signature]</i>
6	.....	Ka. BAPPEDA	6.....
7	.....	Kabag. Hukum Setda	7.....
8	.....	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8.....
9	.....	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9.....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

  
**Drs. DRUPODO, M.Si**  
NIP. 19670421 199303 1 009





**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2020  
MEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN KUA/PPAS  
TAHUN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Saya hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Ketua, sekretaris dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) Tahun Anggaran 2020.

**I. PENDAHULUAN :**

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD;
4. Hasil pembahasan dan konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, yang diterima Badan Anggaran dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

## II. D A S A R.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020

14. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
15. Surat Bupati Rembang Nomor 050/1709/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020;
16. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 24 Agustus 2020 yang mengagendakan Penjadualan Pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020.

### III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada:
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 25 Agustus 2020
  - Jam : 11.00. WIB
  - Acara : penjelasan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020
- b. Rapat Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi dilakukan pada :
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 25 Agustus 2020
  - Jam : 12.00 WIB
  - Acara : Strategi dan Distribusi Pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020
- c. Rapat Komisi I, II, III, dan IV bersama OPD dilakukan pada:
  - Hari : Rabu, Kamis, Jumat
  - Tanggal : 26 – 28 Agustus 2020
  - Jam : 11.00 WIB - Selesai
  - Acara : Pendalaman terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020
- d. Rapat Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi dilakukan pada :
  - Hari : Senin
  - Tanggal : 31 Agustus 2020
  - Jam : 12.00 WIB
  - Acara : Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020
- e. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada:
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 1 September 2020

Jam : 12.00 WIB  
Acara : Sinkronisasi pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020

f. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 1 September 2020  
Jam : 14.00 WIB  
Acara : menyiapkan bahan laporan pembahasan atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020

#### **IV. HASIL RAPAT**

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

## RINGKASAN KUPA - PPAS PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)				PEMBAHASAN		
		APBD INDIK 2020	KUPA PPAS PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) DARI INDIK 2020	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI USULAN PERUBAHAN	
1		3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
1	PENDAPATAN DAERAH	1,891,753,253,706	1,858,802,158,908	(32,951,094,798)	1,859,890,949,423	(31,862,304,283)	1,088,790,515,00	
1.01	Pendapatan Asli Daerah	307,258,621,706	289,913,982,908	(17,344,638,798)	291,002,773,423	(16,255,848,283)	1,088,790,515,00	
1.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000	80,026,500,000	(20,495,750,000)	80,026,500,000	(20,495,750,000)	-	
1.01.02	Hasil Retribusi Daerah	23,051,081,000	14,413,896,775	(8,637,184,225)	14,728,896,775	(8,322,184,225)	315,000,000,00	
1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000	10,840,309,000	-	10,840,309,000	-	-	
1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,844,981,706	184,633,277,133	11,788,295,427	185,407,067,648	12,562,085,942	773,790,515,00	
1.02	Dana Perimbangan	1,118,646,021,000	1,021,651,523,000	(96,994,498,000)	1,021,651,523,000	(96,994,498,000)	-	
1.02.01	Dana Transfer Umum	854,512,647,000	787,373,341,000	(67,139,306,000)	787,373,341,000	(67,139,306,000)	-	
1.02.02	Dana Transfer Khusus	264,133,374,000	234,278,182,000	(29,855,192,000)	234,278,182,000	(29,855,192,000)	-	
1.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	465,848,611,000	547,236,653,000	81,388,042,000	547,236,653,000	81,388,042,000	-	
1.03.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	66,256,175,000	61,256,175,000	66,256,175,000	61,256,175,000	-	
1.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	106,030,000,000	105,622,999,000	(407,001,000)	105,622,999,000	(407,001,000)	-	
1.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	354,818,611,000	356,270,479,000	1,451,868,000	356,270,479,000	1,451,868,000	-	
1.03.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	19,087,000,000	19,087,000,000	19,087,000,000	19,087,000,000	-	
2.	BELANJA DAERAH	1,964,433,829,762	1,884,777,586,725	(79,656,243,037)	1,885,866,377,240	(78,567,452,522)	1,088,790,515	
2.01	Belanja Tidak Langsung	1,180,614,557,366	1,200,480,342,490	19,865,785,124	1,201,751,133,005	21,136,575,639	1,270,790,515,00	
2.01.01	Belanja Pegawai	698,334,578,666	646,625,549,000	(51,709,029,666)	646,236,339,515	(52,098,239,151)	(389,209,485,00)	
2.01.02	Belanja Bunga	1,631,632,000	1,631,632,000	-	1,631,632,000	-	-	
2.01.04	Belanja Hibah	81,476,375,000	86,772,210,000	5,295,835,000	87,502,210,000	6,025,835,000	730,000,000,00	
2.01.05	Belanja Bantuan Sosial	8,299,720,000	4,079,720,000	(4,220,000,000)	4,079,720,000	(4,220,000,000)	-	
2.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,357,333,100	12,357,333,100	-	12,357,333,100	-	-	
2.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	377,514,918,600	391,747,638,587	14,232,719,987	392,677,638,587	15,162,719,987	930,000,000,00	
2.01.08	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	57,266,259,803	56,266,259,803	57,266,259,803	56,266,259,803	-	



NO	SKPD	JUMLAH (Rp)				PEMBAHASAN		
		APBD INDIK 2020	KUPA PPAS PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) DARI INDIK 2020	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI USULAN PERUBAHAN	
		3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
1								
2.02	Belanja Langsung	783,819,272,396	684,297,244,235	(99,522,028,161)	684,115,244,235	(99,704,028,161)	(182,000,000)	
	surplus (devisit)	(72,680,576,056)	(25,975,427,817)	46,705,148,239	(25,975,427,817)	46,705,148,239	-	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.01	Penerimaan Pembiayaan	162,548,944,056	120,143,795,817	(42,405,148,239)	120,143,795,817	(42,405,148,239)	-	
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82,548,944,056	40,143,795,817	(42,405,148,239)	40,143,795,817	(42,405,148,239)	-	
	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-	-	
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	162,548,944,056	120,143,795,817	(42,405,148,239)	120,143,795,817	(42,405,148,239)	-	
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	89,868,368,000	94,168,368,000	4,300,000,000	94,168,368,000	4,300,000,000	-	
3.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000	10,300,000,000	4,300,000,000	10,300,000,000	4,300,000,000	-	
3.02.03	Pembayaran pokok utang	83,868,368,000	83,868,368,000	-	83,868,368,000	-	-	
	Pembayaran Hutang Jangka Pendek BLUD	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	89,868,368,000	94,168,368,000	4,300,000,000	94,168,368,000	4,300,000,000	-	
	Pembiayaan Netto	72,680,576,056	25,975,427,817	(46,705,148,239)	25,975,427,817	(46,705,148,239)	-	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	-	-	-	

PROYEKSI PENERIMAAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		APBD INDIUK 2020	KUPA PPAS PERUBAHAN 2020	5 = 4-3	PERSETUJUAN		BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	8 = 6-4	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7= 6-3	8 = 6-4	9		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	307,258,621,706.00	289,913,982,907.80	(17,344,638,798.20)	291,002,773,422.80	(16,255,848,283.20)	1,088,790,515.00			
1.1.1	Pajak Daerah	100,522,250,000.00	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	80,026,500,000.00	(20,495,750,000.00)	-			
1.1.2	Retribusi Daerah	23,051,081,000.00	14,413,896,774.80	(8,637,184,225.20)	14,728,896,774.80	(8,322,184,225.20)	315,000,000.00			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000.00	10,840,309,000.00	-	10,840,309,000.00	-	-			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,844,981,706.00	184,633,277,133.00	11,788,295,427.00	185,407,067,648.00	12,562,085,942.00	773,790,515.00			
1.2	Dana Perimbangan	1,118,646,021,000.00	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	1,021,651,523,000.00	(96,994,498,000.00)	-			
1.2.2	Dana Transfer Umum	854,512,647,000.00	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	787,373,341,000.00	(67,139,306,000.00)	-			
1.2.3	Dana Transfer Khusus	264,133,374,000.00	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	234,278,182,000.00	(29,855,192,000.00)	-			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	465,848,611,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	547,236,653,000.00	81,388,042,000.00	-			
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	66,256,175,000.00	61,256,175,000.00	-			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	106,030,000,000.00	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	105,622,999,000.00	(407,001,000.00)	-			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	354,818,611,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	356,270,479,000.00	1,451,868,000.00	-			
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	19,087,000,000.00	-			
	<b>JULAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,891,753,253,706.00</b>	<b>1,858,802,158,907.80</b>	<b>(32,951,094,798.20)</b>	<b>1,859,890,949,422.80</b>	<b>(31,862,304,283.20)</b>	<b>1,088,790,515.00</b>			

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA-PPAS PERUBAHAN 2020

NO.	SKPD	APBD INDUK 2020		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5=3+4
1	DINPENDIKPORA	427,496,282,000.00	89,177,869,800.00	516,674,151,800.00
2	DINAS KESEHATAN	55,214,600,000.00	123,750,741,245.00	178,965,341,245.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	30,647,269,000.00	119,237,212,000.00	149,884,481,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,860,233,000.00	89,512,836,000.00	98,373,069,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14,924,697,000.00	20,025,350,250.00	34,950,047,250.00
6	SATPOL PP	6,651,942,000.00	5,826,158,800.00	12,478,100,800.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,307,376,000.00	1,530,000,000.00	4,837,376,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,527,415,000.00	8,997,425,000.00	12,524,840,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7,375,120,000.00	15,776,383,000.00	23,151,503,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,033,113,000.00	9,132,760,000.00	14,165,873,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15,647,870,000.00	39,380,000,000.00	55,027,870,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,786,420,000.00	13,046,937,250.00	21,833,357,250.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,466,173,000.00	5,115,094,391.00	8,581,267,391.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	393,011,294,700.00	5,668,044,200.00	398,679,338,900.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,606,294,000.00	18,094,543,000.00	23,700,837,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,727,639,000.00	6,140,700,000.00	8,868,339,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,414,838,000.00	12,256,725,000.00	15,671,563,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,941,772,000.00	1,710,000,000.00	4,651,772,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,563,847,000.00	21,997,996,750.00	28,561,843,750.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,535,564,666.00	21,861,841,250.00	32,397,405,916.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00	-	20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	778,011,000.00	-	778,011,000.00
23	SETDA	60,754,657,000.00	38,461,498,680.00	99,216,155,680.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,860,260,000.00	47,209,899,000.00	52,070,159,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	6,509,067,000.00	8,099,398,000.00	14,608,465,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,353,730,000.00	900,481,000.00	3,254,211,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,319,037,000.00	1,160,228,000.00	3,479,265,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,160,219,000.00	995,698,000.00	3,155,917,000.00
29	KECAMATAN BULU	2,006,524,000.00	1,042,468,000.00	3,048,992,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,369,084,000.00	951,462,880.00	3,320,546,880.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,179,181,000.00	932,503,000.00	3,111,684,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,703,630,000.00	966,654,000.00	2,670,284,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,826,959,000.00	1,359,500,000.00	3,186,459,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,722,152,000.00	1,470,066,000.00	3,192,218,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,826,328,000.00	1,171,915,000.00	2,998,243,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,224,931,000.00	1,050,000,000.00	3,274,931,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,140,251,000.00	1,057,725,000.00	3,197,976,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,470,796,000.00	1,110,003,000.00	3,580,799,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,406,533,000.00	11,226,474,900.00	15,633,007,900.00
40	BAPPEDA	3,569,309,000.00	8,346,538,000.00	11,915,847,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	31,257,152,000.00	19,249,198,000.00	50,506,350,000.00
a	(SKPD)	30,257,152,000.00	19,249,198,000.00	49,506,350,000.00
b	(PPKD)	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
42	BKD	4,588,824,000.00	8,818,944,000.00	13,407,768,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,180,814,557,366.00</b>	<b>783,819,272,396.00</b>	<b>1,964,433,829,762.00</b>

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA**

NO.	SKPD	RANCANGAN KUPA PPAS PERUBAHAN 2020		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	9	10	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	398,116,510,000.00	140,966,005,725.00	539,082,515,725.00
2	DINAS KESEHATAN	53,389,729,000.00	123,321,648,665.58	176,711,377,665.58
3	RSUD dr R. SOETRASNO	29,986,027,000.00	136,576,008,734.22	166,562,035,734.22
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,090,727,000.00	66,492,951,266.00	74,583,678,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,043,983,000.00	7,512,308,573.00	17,556,291,573.00
6	SATPOL PP	6,210,856,000.00	3,432,717,856.00	9,643,573,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,400,626,987.00	848,068,708.00	4,248,695,695.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,159,056,000.00	4,065,976,708.00	7,225,032,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,632,305,000.00	11,033,591,708.00	17,665,896,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,693,397,000.00	2,726,813,367.00	7,420,210,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15,899,316,000.00	20,368,971,170.00	36,268,287,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,172,401,000.00	4,590,251,531.00	12,762,652,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,276,137,000.00	3,582,723,696.00	6,858,860,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	407,727,186,700.00	3,517,721,128.00	411,244,907,828.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,024,669,000.00	13,164,254,247.00	18,188,923,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,497,013,000.00	3,157,043,000.00	5,654,056,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,952,934,000.00	8,545,178,708.00	11,498,112,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,718,690,000.00	732,766,708.00	3,451,456,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,462,089,000.00	12,021,760,418.00	18,483,849,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	11,722,958,000.00	7,353,651,258.00	19,076,609,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00	-	20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,833,000.00	-	762,833,000.00
23	SETDA	63,990,806,000.00	36,998,128,486.00	100,988,934,486.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,475,630,000.00	26,644,651,440.00	31,120,281,440.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,950,188,000.00	5,319,965,905.00	11,270,153,905.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,201,057,000.00	708,200,600.00	2,909,257,600.00
27	KECAMATAN SULANG	2,048,584,000.00	692,074,400.00	2,740,658,400.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,030,115,000.00	737,670,800.00	2,767,785,800.00
29	KECAMATAN BULU	1,696,826,000.00	903,823,300.00	2,600,649,300.00
30	KECAMATAN LASEM	2,159,116,000.00	979,135,008.00	3,138,251,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,919,290,000.00	788,053,800.00	2,707,343,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,489,191,000.00	787,066,000.00	2,276,257,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,717,201,000.00	1,152,698,400.00	2,869,899,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,426,023,000.00	1,013,688,600.00	2,439,711,600.00
35	KECAMATAN SALE	1,700,894,000.00	779,728,000.00	2,480,622,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,060,311,000.00	741,870,200.00	2,802,181,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,944,564,000.00	835,026,400.00	2,779,590,400.00
38	KECAMATAN SARANG	2,287,198,000.00	764,509,800.00	3,051,707,800.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,076,994,000.00	8,931,176,708.00	13,008,170,708.00
40	BAPPEDA	3,440,794,000.00	4,785,134,258.00	8,225,928,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	77,908,158,803.00	11,807,774,723.00	89,715,933,526.00
a	(SKPD)	20,641,899,000.00	11,807,774,723.00	32,449,673,723.00
b	(PPKD)	57,266,259,803.00	-	57,266,259,803.00
42	BKD	4,169,795,000.00	4,916,454,232.00	9,086,249,232.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,200,480,342,490.00</b>	<b>684,297,244,234.80</b>	<b>1,884,777,586,724.80</b>



REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINPENDIKPORA	(29,379,772,000.00)	51,788,135,925.00	22,408,363,925.00
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	(429,092,579.42)	(2,253,963,579.42)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	17,338,796,734.22	16,677,554,734.22
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(769,506,000.00)	(23,019,884,734.00)	(23,789,390,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(4,880,714,000.00)	(12,513,041,677.00)	(17,393,755,677.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	(2,393,440,944.00)	(2,834,526,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	93,250,987.00	(681,931,292.00)	(588,680,305.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(368,359,000.00)	(4,931,448,292.00)	(5,299,807,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(742,815,000.00)	(4,742,791,292.00)	(5,485,606,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	(6,405,946,633.00)	(6,745,662,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	251,446,000.00	(19,011,028,830.00)	(18,759,582,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(614,019,000.00)	(8,456,685,719.00)	(9,070,704,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(190,036,000.00)	(1,532,370,695.00)	(1,722,406,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14,715,892,000.00	(2,150,323,072.00)	12,565,568,928.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,625,000.00)	(4,930,288,753.00)	(5,511,913,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(230,626,000.00)	(2,983,657,000.00)	(3,214,283,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(461,904,000.00)	(3,711,546,292.00)	(4,173,450,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	(977,233,292.00)	(1,200,315,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(101,758,000.00)	(9,976,236,332.00)	(10,077,994,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,187,393,334.00	(14,508,189,992.00)	(13,320,796,658.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	3,236,149,000.00	(1,463,370,194.00)	1,772,778,806.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	(20,565,247,560.00)	(20,949,877,560.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(558,879,000.00)	(2,779,432,095.00)	(3,338,311,095.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	(192,280,400.00)	(344,953,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	(270,453,000.00)	(468,153,600.00)	(738,606,600.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	(258,027,200.00)	(388,131,200.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	(138,644,700.00)	(448,342,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	27,672,128.00	(182,295,872.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	(144,449,200.00)	(404,340,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	(179,588,000.00)	(394,027,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	(206,801,600.00)	(316,559,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	(456,377,400.00)	(752,506,400.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	(392,187,000.00)	(517,621,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	(308,129,800.00)	(472,749,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(195,687,000.00)	(222,698,600.00)	(418,385,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	(345,493,200.00)	(529,091,200.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(329,539,000.00)	(2,295,298,192.00)	(2,624,837,192.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	(3,561,403,742.00)	(3,689,918,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	46,651,006,803.00	(7,441,423,277.00)	39,209,583,526.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	(7,441,423,277.00)	(17,056,676,277.00)
b	(PPKD)	56,266,259,803.00	-	56,266,259,803.00
42	BKD	(419,029,000.00)	(3,902,489,768.00)	(4,321,518,768.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>19,865,785,124.00</b>	<b>(99,522,028,161.20)</b>	<b>(79,656,243,037.20)</b>



REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		PERSETUJUAN		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	17	18	19=17+18
1	DINPENDIKPORA	398,356,510,000.00	140,321,005,725.00	538,677,515,725.00
2	DINAS KESEHATAN	53,389,729,000.00	123,521,648,665.58	176,911,377,665.58
3	RSUD dr R. SOETRASNO	29,986,027,000.00	136,576,008,734.22	166,562,035,734.22
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,090,727,000.00	66,534,676,266.00	74,625,403,266.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,043,983,000.00	7,574,598,573.00	17,618,581,573.00
6	SATPOL PP	6,210,856,000.00	3,612,717,856.00	9,823,573,856.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,520,126,987.00	878,068,708.00	4,398,195,695.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,159,056,000.00	4,035,976,708.00	7,195,032,708.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,194,305,000.00	11,226,591,708.00	17,420,896,708.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,693,397,000.00	2,788,813,367.00	7,482,210,367.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15,939,316,000.00	20,476,971,170.00	36,416,287,170.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,172,401,000.00	4,782,961,531.00	12,955,362,531.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,276,137,000.00	3,582,723,696.00	6,858,860,696.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	408,657,186,700.00	3,597,721,128.00	412,254,907,828.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,024,669,000.00	13,289,254,247.00	18,313,923,247.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,497,013,000.00	3,157,043,000.00	5,654,056,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,962,934,000.00	8,628,453,708.00	11,591,387,708.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,718,690,000.00	732,766,708.00	3,451,456,708.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,137,089,000.00	12,111,760,418.00	18,248,849,418.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	11,737,958,000.00	7,718,651,258.00	19,456,609,258.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00	-	20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,833,000.00	-	762,833,000.00
23	SETDA	64,566,306,000.00	37,108,128,486.00	101,674,434,486.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,475,630,000.00	25,114,651,440.00	29,590,281,440.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,954,886,091.00	5,319,965,905.00	11,274,851,996.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,201,057,000.00	708,200,600.00	2,909,257,600.00
27	KECAMATAN SULANG	2,133,276,424.00	692,074,400.00	2,825,350,824.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,030,115,000.00	737,670,800.00	2,767,785,800.00
29	KECAMATAN BULU	1,696,826,000.00	903,823,300.00	2,600,649,300.00
30	KECAMATAN LASEM	2,159,116,000.00	979,135,008.00	3,138,251,008.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,919,290,000.00	788,053,800.00	2,707,343,800.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,489,191,000.00	787,066,000.00	2,276,257,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,717,201,000.00	1,152,698,400.00	2,869,899,400.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,426,023,000.00	1,013,688,600.00	2,439,711,600.00
35	KECAMATAN SALE	1,700,894,000.00	779,728,000.00	2,480,622,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,060,311,000.00	741,870,200.00	2,802,181,200.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,958,964,000.00	835,026,400.00	2,793,990,400.00
38	KECAMATAN SARANG	2,287,198,000.00	764,509,800.00	3,051,707,800.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4,076,994,000.00	8,931,176,708.00	13,008,170,708.00
40	BAPPEDA	3,440,794,000.00	4,785,134,258.00	8,225,928,258.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	77,908,158,803.00	11,907,774,723.00	89,815,933,526.00
a	(SKPD)	20,641,899,000.00	11,907,774,723.00	32,549,673,723.00
b	(PPKD)	57,266,259,803.00	-	57,266,259,803.00
42	BKD	4,169,795,000.00	4,916,454,232.00	9,086,249,232.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,201,751,133,005.00</b>	<b>684,115,244,234.80</b>	<b>1,885,866,377,239.80</b>

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA**

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINPENDIKPORA	(29,139,772,000.00)	51,143,135,925.00	22,003,363,925.00
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	(229,092,579.42)	(2,053,963,579.42)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	17,338,796,734.22	16,677,554,734.22
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(769,506,000.00)	(22,978,159,734.00)	(23,747,665,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(4,880,714,000.00)	(12,450,751,677.00)	(17,331,465,677.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	(2,213,440,944.00)	(2,654,526,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	212,750,987.00	(651,931,292.00)	(439,180,305.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(368,359,000.00)	(4,961,448,292.00)	(5,329,807,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(1,180,815,000.00)	(4,549,791,292.00)	(5,730,606,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	(6,343,946,633.00)	(6,683,662,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	291,446,000.00	(18,903,028,830.00)	(18,611,582,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(614,019,000.00)	(8,263,975,719.00)	(8,877,994,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(190,036,000.00)	(1,532,370,695.00)	(1,722,406,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15,645,892,000.00	(2,070,323,072.00)	13,575,568,928.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,625,000.00)	(4,805,288,753.00)	(5,386,913,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(230,626,000.00)	(2,983,657,000.00)	(3,214,283,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(451,904,000.00)	(3,628,271,292.00)	(4,080,175,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	(977,233,292.00)	(1,200,315,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(426,758,000.00)	(9,886,236,332.00)	(10,312,994,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,202,393,334.00	(14,143,189,992.00)	(12,940,796,658.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	3,811,649,000.00	(1,353,370,194.00)	2,458,278,806.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	(22,095,247,560.00)	(22,479,877,560.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(554,180,909.00)	(2,779,432,095.00)	(3,333,613,004.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	(192,280,400.00)	(344,953,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	(185,760,576.00)	(468,153,600.00)	(653,914,176.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	(258,027,200.00)	(388,131,200.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	(138,644,700.00)	(448,342,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	27,672,128.00	(182,295,872.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	(144,449,200.00)	(404,340,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	(179,588,000.00)	(394,027,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	(206,801,600.00)	(316,559,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	(456,377,400.00)	(752,506,400.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	(392,187,000.00)	(517,621,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	(308,129,800.00)	(472,749,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(181,287,000.00)	(222,698,600.00)	(403,985,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	(345,493,200.00)	(529,091,200.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(329,539,000.00)	(2,295,298,192.00)	(2,624,837,192.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	(3,561,403,742.00)	(3,689,918,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	46,651,006,803.00	(7,341,423,277.00)	39,309,583,526.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	(7,341,423,277.00)	(16,956,676,277.00)
b	(PPKD)	56,266,259,803.00	-	56,266,259,803.00
42	BKD	(419,029,000.00)	(3,902,489,768.00)	(4,321,518,768.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>21,136,575,639.00</b>	<b>(99,704,028,161.20)</b>	<b>(78,567,452,522.20)</b>

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SKPD KUPA

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		BERTAMBAH (BERKURANG)		
		BELANJA		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINPENDIKPORA	240,000,000.00	(645,000,000.00)	(405,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	200,000,000.00	200,000,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	41,725,000.00	41,725,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	62,290,000.00	62,290,000.00
6	SATPOL PP	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	119,500,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(30,000,000.00)	(30,000,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(438,000,000.00)	193,000,000.00	(245,000,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	62,000,000.00	62,000,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	40,000,000.00	108,000,000.00	148,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	192,710,000.00	192,710,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	930,000,000.00	80,000,000.00	1,010,000,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	125,000,000.00	125,000,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10,000,000.00	83,275,000.00	93,275,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(325,000,000.00)	90,000,000.00	(235,000,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	15,000,000.00	365,000,000.00	380,000,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-
23	SETDA	575,500,000.00	110,000,000.00	685,500,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(1,530,000,000.00)	(1,530,000,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	4,698,091.00	-	4,698,091.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	84,692,424.00	-	84,692,424.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	14,400,000.00	-	14,400,000.00
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	100,000,000.00	100,000,000.00
a	(SKPD)	-	100,000,000.00	100,000,000.00
b	(PPKD)	-	-	-
42	BKD	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,270,790,515.00</b>	<b>(182,000,000.00)</b>	<b>1,088,790,515.00</b>



**BELANJA**  
**REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG**

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							JUMLAH
		APBD INDUK 2020							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	400,960,782,000.00			26,535,500,000.00				427,496,282,000.00
2	DINAS KESEHATAN	55,214,600,000.00							55,214,600,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	29,015,637,000.00	1,631,632,000.00						30,647,269,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,860,233,000.00							8,860,233,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,464,697,000.00			3,120,000,000.00	6,340,000,000.00			14,924,697,000.00
6	SATPOL PP	6,651,942,000.00							6,651,942,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,384,926,000.00			795,000,000.00		1,127,450,000.00		3,307,376,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,277,415,000.00			50,000,000.00	200,000,000.00			3,527,415,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	6,065,400,000.00			50,000,000.00	1,259,720,000.00			7,375,120,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,033,113,000.00							5,033,113,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,648,870,000.00			2,999,000,000.00				15,647,870,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,786,420,000.00							8,786,420,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,466,173,000.00							3,466,173,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,666,493,000.00		12,357,333,100.00	600,000,000.00		376,387,468,600.00		393,011,294,700.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,606,294,000.00							5,606,294,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,727,639,000.00							2,727,639,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,844,838,000.00			570,000,000.00				3,414,838,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,941,772,000.00							2,941,772,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,854,847,000.00			2,709,000,000.00				6,563,847,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,485,564,666.00			50,000,000.00				10,535,564,666.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00							20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	778,011,000.00							778,011,000.00
23	SETDA	16,256,782,000.00			43,997,875,000.00	500,000,000.00			60,754,657,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,860,260,000.00							4,860,260,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	6,509,067,000.00							6,509,067,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,353,730,000.00							2,353,730,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,319,037,000.00							2,319,037,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,160,219,000.00							2,160,219,000.00
29	KECAMATAN BULU	2,006,524,000.00							2,006,524,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,369,084,000.00							2,369,084,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,179,181,000.00							2,179,181,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,703,630,000.00							1,703,630,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,826,959,000.00							1,826,959,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,722,152,000.00							1,722,152,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,826,328,000.00							1,826,328,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,224,931,000.00							2,224,931,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	2,140,251,000.00							2,140,251,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,470,796,000.00							2,470,796,000.00
39	INSPEKTORAT	4,406,533,000.00							4,406,533,000.00
40	BAPPEDA	3,569,309,000.00							3,569,309,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30,257,152,000.00						1,000,000,000.00	31,257,152,000.00
a	(SKPD)	30,257,152,000.00							30,257,152,000.00
b	(PPKD)							1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
42	BKD	4,588,824,000.00							4,588,824,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>698,334,578,666.00</b>	<b>1,631,632,000.00</b>	<b>12,357,333,100.00</b>	<b>81,476,375,000.00</b>	<b>8,299,720,000.00</b>	<b>377,514,918,600.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,180,614,557,366.00</b>

**BELANJA**  
**REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS**

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							JUMLAH	
		RANCANGAN KUA PERUBAHAN 2020								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17	
1	DINPENDIKPORA	375.662.510,000.00			22.454.000,000.00					398.116.510,000.00
2	DINAS KESEHATAN	53.389.729,000.00								53.389.729,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28.354.395,000.00	1.631.632,000.00							29.986.027,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.090.727,000.00								8.090.727,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.046.148,000.00			2.877.835,000.00	2.120.000,000.00				10.043.983,000.00
6	SATPOL PP	6.210.856,000.00								6.210.856,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.173.591,000.00			1.035.000,000.00		1.192.035.987.00			3.400.626.987.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.959.056,000.00				200.000,000.00				3.159.056,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4.792.585,000.00			580.000,000.00	1.259.720,000.00				6.632.305,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.693.397,000.00								4.693.397,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11.572.316,000.00			4.327.000,000.00					15.899.316,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.172.401,000.00								8.172.401,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.276.137,000.00								3.276.137,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.377.251,000.00		12.357.333.100.00	1.437.000,000.00		390.555.602.600.00			407.727.186.700.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.024.669,000.00								5.024.669,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.467.013,000.00			30.000,000.00					2.497.013,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.627.934,000.00			325.000,000.00					2.952.934,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.718.690,000.00								2.718.690,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.593.089,000.00			2.869.000,000.00					6.462.089,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9.929.958,000.00			1.793.000,000.00					11.722.958,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20.848.163,000.00								20.848.163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762.833,000.00								762.833,000.00
23	SETDA	14.446.431,000.00			49.044.375,000.00	500.000,000.00				63.990.806,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4.475.630,000.00								4.475.630,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	5.950.188,000.00								5.950.188,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2.201.057,000.00								2.201.057,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2.048.584,000.00								2.048.584,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	2.030.115,000.00								2.030.115,000.00
29	KECAMATAN BULU	1.696.826,000.00								1.696.826,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2.159.116,000.00								2.159.116,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	1.919.290,000.00								1.919.290,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1.489.191,000.00								1.489.191,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.717.201,000.00								1.717.201,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1.426.023,000.00								1.426.023,000.00
35	KECAMATAN SALE	1.700.894,000.00								1.700.894,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2.060.311,000.00								2.060.311,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	1.944.564,000.00								1.944.564,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2.287.198,000.00								2.287.198,000.00
39	INSPEKTORAT	4.076.994,000.00								4.076.994,000.00
40	BAPPEDA	3.440.794,000.00								3.440.794,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.641.899,000.00						57.266.259.803.00		77.908.158.803.00
a	(SKPD)	20.641.899,000.00								20.641.899,000.00
b	(PPKD)							57.266.259.803.00		57.266.259.803.00
42	BKD	4.169.795,000.00								4.169.795,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>646,625,549,000.00</b>	<b>1,631,632,000.00</b>	<b>12,357,333,100.00</b>	<b>86,772,210,000.00</b>	<b>4,079,720,000.00</b>	<b>391,747,638,587.00</b>	<b>57,266,259,803.00</b>		<b>1,200,480,342,490.00</b>



**BELANJA**  
**REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS**

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		BERTAMBAH / (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(25,298,272,000.00)	-	-	(4,081,500,000.00)	-	-	-	(29,379,772,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	-	-	-	-	-	-	(1,824,871,000.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	-	-	-	-	-	-	(661,242,000.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(769,506,000.00)	-	-	-	-	-	-	(769,506,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(418,549,000.00)	-	-	(242,165,000.00)	(4,220,000,000.00)	-	-	(4,880,714,000.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	-	-	-	-	-	-	(441,086,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(211,335,000.00)	-	-	240,000,000.00	-	64,585,987.00	-	93,250,987.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(318,359,000.00)	-	-	(50,000,000.00)	-	-	-	(368,359,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(1,272,815,000.00)	-	-	530,000,000.00	-	-	-	(742,815,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	-	-	-	-	-	-	(339,716,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,076,554,000.00)	-	-	1,328,000,000.00	-	-	-	251,446,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(614,019,000.00)	-	-	-	-	-	-	(614,019,000.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(190,036,000.00)	-	-	-	-	-	-	(190,036,000.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(289,242,000.00)	-	-	837,000,000.00	-	14,168,134,000.00	-	14,715,892,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,625,000.00)	-	-	-	-	-	-	(581,625,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(260,626,000.00)	-	-	30,000,000.00	-	-	-	(230,626,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(216,904,000.00)	-	-	(245,000,000.00)	-	-	-	(461,904,000.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	-	-	-	-	-	-	(223,082,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(261,758,000.00)	-	-	160,000,000.00	-	-	-	(101,758,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(555,606,666.00)	-	-	1,743,000,000.00	-	-	-	1,187,393,334.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-	-	-	-	-	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	(1,810,351,000.00)	-	-	5,046,500,000.00	-	-	-	3,236,149,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	-	-	-	-	-	-	(384,630,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(558,879,000.00)	-	-	-	-	-	-	(558,879,000.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	-	-	-	-	-	-	(152,673,000.00)
27	KECAMATAN SULANG	(270,453,000.00)	-	-	-	-	-	-	(270,453,000.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	-	-	-	-	-	-	(130,104,000.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	-	-	-	-	-	-	(309,698,000.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	-	-	-	-	-	-	(209,968,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	-	-	-	-	-	-	(259,891,000.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	-	-	-	-	-	-	(214,439,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	-	-	-	-	-	-	(109,758,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	-	-	-	-	-	-	(296,129,000.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	-	-	-	-	-	-	(125,434,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	-	-	-	-	-	-	(164,620,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(195,687,000.00)	-	-	-	-	-	-	(195,687,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	-	-	-	-	-	-	(183,598,000.00)
39	INSPEKTORAT	(329,539,000.00)	-	-	-	-	-	-	(329,539,000.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	-	-	-	-	-	-	(128,515,000.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(9,615,253,000.00)	-	-	-	-	-	56,266,259,803.00	46,651,006,803.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	-	-	-	-	-	-	(9,615,253,000.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	56,266,259,803.00	56,266,259,803.00
42	BKD	(419,029,000.00)	-	-	-	-	-	-	(419,029,000.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(51,709,029,666.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,295,835,000.00</b>	<b>(4,220,000,000.00)</b>	<b>14,232,719,987.00</b>	<b>56,266,259,803.00</b>	<b>19,865,785,124.00</b>

**BELANJA**  
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							JUMLAH	
		PERSETUJUAN								
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33	
1	DINPENDIKPORA	375,562,510,000.00			22,794,000,000.00					398,356,510,000.00
2	DINAS KESEHATAN	53,389,729,000.00								53,389,729,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	28,354,395,000.00	1,631,632,000.00							29,986,027,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,090,727,000.00								8,090,727,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,046,148,000.00			2,877,835,000.00	2,120,000,000.00				10,043,983,000.00
6	SATPOL PP	6,210,856,000.00								6,210,856,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,173,591,000.00			1,154,500,000.00		1,192,035,987.00			3,520,126,987.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,959,066,000.00				200,000,000.00				3,159,066,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,399,585,000.00			535,000,000.00	1,259,720,000.00				6,194,305,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,693,397,000.00								4,693,397,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,572,316,000.00			4,367,000,000.00					15,939,316,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,172,401,000.00								8,172,401,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	3,276,137,000.00								3,276,137,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,377,251,000.00		12,357,333,100.00	1,437,000,000.00		391,485,602,600.00			408,657,186,700.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,024,669,000.00								5,024,669,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,497,013,000.00			30,000,000.00					2,497,013,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,627,934,000.00			335,000,000.00					2,962,934,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,718,690,000.00								2,718,690,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,593,089,000.00			2,544,000,000.00					6,137,089,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9,929,958,000.00			1,808,000,000.00					11,737,958,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20,848,163,000.00								20,848,163,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,833,000.00								762,833,000.00
23	SETDA	14,446,431,000.00			49,619,875,000.00	500,000,000.00				64,566,306,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	4,475,630,000.00								4,475,630,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	5,954,886,091.00								5,954,886,091.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,201,057,000.00								2,201,057,000.00
27	KECAMATAN SULANG	2,133,276,424.00								2,133,276,424.00
28	KECAMATAN SUMBER	2,030,115,000.00								2,030,115,000.00
29	KECAMATAN BULU	1,696,826,000.00								1,696,826,000.00
30	KECAMATAN LASEM	2,159,116,000.00								2,159,116,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,919,290,000.00								1,919,290,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,489,191,000.00								1,489,191,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,717,201,000.00								1,717,201,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,426,023,000.00								1,426,023,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,700,894,000.00								1,700,894,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	2,060,311,000.00								2,060,311,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,958,964,000.00								1,958,964,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,287,198,000.00								2,287,198,000.00
39	INSPEKTORAT	4,076,994,000.00								4,076,994,000.00
40	BAPPEDA	3,440,794,000.00								3,440,794,000.00
41	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20,641,899,000.00						57,266,259,803.00		77,908,158,803.00
a	(SKPD)	20,641,899,000.00								20,641,899,000.00
b	(PPKD)							57,266,259,803.00		57,266,259,803.00
42	BKD	4,169,795,000.00								4,169,795,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>646,236,339,515.00</b>	<b>1,631,632,000.00</b>	<b>12,357,333,100.00</b>	<b>87,502,210,000.00</b>	<b>4,079,720,000.00</b>	<b>392,677,638,587.00</b>	<b>57,266,259,803.00</b>	<b>1,201,751,133,005.00</b>	

**BELANJA**  
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							JUMLAH
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4	37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40+41
1	DINPENDIKPORA	(25,398,272,000.00)	-	-	(3,741,500,000.00)	-	-	-	(29,139,772,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	(1,824,871,000.00)	-	-	-	-	-	-	(1,824,871,000.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(661,242,000.00)	-	-	-	-	-	-	(661,242,000.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG	(769,506,000.00)	-	-	-	-	-	-	(769,506,000.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(418,549,000.00)	-	-	(242,165,000.00)	(4,220,000,000.00)	-	-	(4,880,714,000.00)
6	SATPOL PP	(441,086,000.00)	-	-	-	-	-	-	(441,086,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(211,335,000.00)	-	-	359,500,000.00	-	64,585,987.00	-	212,750,987.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(318,359,000.00)	-	-	(50,000,000.00)	-	-	-	(368,359,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(1,665,815,000.00)	-	-	485,000,000.00	-	-	-	(1,180,815,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(339,716,000.00)	-	-	-	-	-	-	(339,716,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1,076,554,000.00)	-	-	1,368,000,000.00	-	-	-	291,446,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(614,019,000.00)	-	-	-	-	-	-	(614,019,000.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(190,036,000.00)	-	-	-	-	-	-	(190,036,000.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(289,242,000.00)	-	-	837,000,000.00	-	15,098,134,000.00	-	15,645,892,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(581,625,000.00)	-	-	-	-	-	-	(581,625,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(260,626,000.00)	-	-	30,000,000.00	-	-	-	(230,626,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(216,904,000.00)	-	-	(235,000,000.00)	-	-	-	(451,904,000.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(223,082,000.00)	-	-	-	-	-	-	(223,082,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(261,758,000.00)	-	-	(165,000,000.00)	-	-	-	(426,758,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(555,606,666.00)	-	-	1,758,000,000.00	-	-	-	1,202,393,334.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(15,178,000.00)	-	-	-	-	-	-	(15,178,000.00)
23	SETDA	(1,810,351,000.00)	-	-	5,622,000,000.00	-	-	-	3,811,649,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(384,630,000.00)	-	-	-	-	-	-	(384,630,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(554,180,909.00)	-	-	-	-	-	-	(554,180,909.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(152,673,000.00)	-	-	-	-	-	-	(152,673,000.00)
27	KECAMATAN SULANG	(185,760,576.00)	-	-	-	-	-	-	(185,760,576.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(130,104,000.00)	-	-	-	-	-	-	(130,104,000.00)
29	KECAMATAN BULU	(309,698,000.00)	-	-	-	-	-	-	(309,698,000.00)
30	KECAMATAN LASEM	(209,968,000.00)	-	-	-	-	-	-	(209,968,000.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(259,891,000.00)	-	-	-	-	-	-	(259,891,000.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(214,439,000.00)	-	-	-	-	-	-	(214,439,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(109,758,000.00)	-	-	-	-	-	-	(109,758,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(296,129,000.00)	-	-	-	-	-	-	(296,129,000.00)
35	KECAMATAN SALE	(125,434,000.00)	-	-	-	-	-	-	(125,434,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(164,620,000.00)	-	-	-	-	-	-	(164,620,000.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(181,287,000.00)	-	-	-	-	-	-	(181,287,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	(183,598,000.00)	-	-	-	-	-	-	(183,598,000.00)
39	INSPEKTORAT	(329,539,000.00)	-	-	-	-	-	-	(329,539,000.00)
40	BAPPEDA	(128,515,000.00)	-	-	-	-	-	-	(128,515,000.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(9,615,253,000.00)	-	-	-	-	-	56,266,259,803.00	46,651,006,803.00
a	(SKPD)	(9,615,253,000.00)	-	-	-	-	-	-	(9,615,253,000.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	56,266,259,803.00	56,266,259,803.00
42	BKD	(419,029,000.00)	-	-	-	-	-	-	(419,029,000.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(52,098,239,151.00)</b>	-	-	<b>6,025,835,000.00</b>	<b>(4,220,000,000.00)</b>	<b>15,162,719,987.00</b>	<b>56,266,259,803.00</b>	<b>21,136,575,639.00</b>

**BELANJA**  
**REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS**

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							JUMLAH
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12	45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48+49
1	DINPENDIKPOR	(100,000,000.00)	-	-	340,000,000.00	-	-	-	240,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	119,500,000.00	-	-	-	119,500,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(393,000,000.00)	-	-	(45,000,000.00)	-	-	-	(438,000,000.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	930,000,000.00	-	930,000,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	(325,000,000.00)	-	-	-	(325,000,000.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	575,500,000.00	-	-	-	575,500,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	4,698,091.00	-	-	-	-	-	-	4,698,091.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	84,692,424.00	-	-	-	-	-	-	84,692,424.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	14,400,000.00	-	-	-	-	-	-	14,400,000.00
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-
42	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>(389,209,485.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>930,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,270,790,515.00</b>



**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG**

NO.	SKPD	APBD INDUK 2020	RANCANGAN KUPA PPAS PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	DINPENDIKPORA	89,177,869,800.00	140,966,005,725.00	51,788,135,925.00
2	DINAS KESEHATAN	123,750,741,245.00	123,321,648,665.58	(429,092,579.42)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	119,237,212,000.00	136,576,008,734.22	17,338,796,734.22
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	89,512,836,000.00	66,492,951,266.00	(23,019,884,734.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20,025,350,250.00	7,512,308,573.00	(12,513,041,677.00)
6	SATPOL PP	5,826,158,800.00	3,432,717,856.00	(2,393,440,944.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,530,000,000.00	848,068,708.00	(681,931,292.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8,997,425,000.00	4,065,976,708.00	(4,931,448,292.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	15,776,383,000.00	11,033,591,708.00	(4,742,791,292.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	9,132,760,000.00	2,726,813,367.00	(6,405,946,633.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	39,380,000,000.00	20,368,971,170.00	(19,011,028,830.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13,046,937,250.00	4,590,251,531.00	(8,456,685,719.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	5,115,094,391.00	3,582,723,696.00	(1,532,370,695.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,668,044,200.00	3,517,721,128.00	(2,150,323,072.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	18,094,543,000.00	13,164,254,247.00	(4,930,288,753.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,140,700,000.00	3,157,043,000.00	(2,983,657,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12,256,725,000.00	8,545,178,708.00	(3,711,546,292.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,710,000,000.00	732,766,708.00	(977,233,292.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21,997,996,750.00	12,021,760,418.00	(9,976,236,332.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	21,861,841,250.00	7,353,651,258.00	(14,508,189,992.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		-	-
23	SETDA	38,461,498,680.00	36,998,128,486.00	(1,463,370,194.00)
21	SEKRETARIAT DPRD	47,209,899,000.00	26,644,651,440.00	(20,565,247,560.00)
25	KECAMATAN REMBANG	8,099,398,000.00	5,319,965,905.00	(2,779,432,095.00)
26	KECAMATAN KALIORI	900,481,000.00	708,200,600.00	(192,280,400.00)
27	KECAMATAN SULANG	1,160,228,000.00	692,074,400.00	(468,153,600.00)
28	KECAMATAN SUMBER	995,698,000.00	737,670,800.00	(258,027,200.00)
29	KECAMATAN BULU	1,042,468,000.00	903,823,300.00	(138,644,700.00)
30	KECAMATAN LASEM	951,462,880.00	979,135,008.00	27,672,128.00
31	KECAMATAN PANCUR	932,503,000.00	788,053,800.00	(144,449,200.00)
32	KECAMATAN SLUKE	966,654,000.00	787,066,000.00	(179,588,000.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,359,500,000.00	1,152,698,400.00	(206,801,600.00)
34	KECAMATAN GUNEM	1,470,066,000.00	1,013,688,600.00	(456,377,400.00)
35	KECAMATAN SALE	1,171,915,000.00	779,728,000.00	(392,187,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	1,050,000,000.00	741,870,200.00	(308,129,800.00)
37	KECAMATAN SEDAN	1,057,725,000.00	835,026,400.00	(222,698,600.00)
38	KECAMATAN SARANG	1,110,003,000.00	764,509,800.00	(345,493,200.00)
39	INSPEKTORAT	11,226,474,900.00	8,931,176,708.00	(2,295,298,192.00)
40	BAPPEDA	8,346,538,000.00	4,785,134,258.00	(3,561,403,742.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19,249,198,000.00	11,807,774,723.00	(7,441,423,277.00)
a	(SKPD)	19,249,198,000.00	11,807,774,723.00	(7,441,423,277.00)
b	(PPKD)			-
42	BKD	8,818,944,000.00	4,916,454,232.00	(3,902,489,768.00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>783,819,272,396.00</b>	<b>684,297,244,234.80</b>	<b>(99,522,028,161.20)</b>

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG**

NO.	SKPD	PEMBAHASAN		
		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI INDUK 2020	BERTAMBAH (BERKURANG) DARI USULAN PERUBAHAN
1	2	6	8 = 6-3	8 = 6-4
1	DINPENDIKPORA	140,321,005,725.00	51,143,135,925.00	(645,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	123,521,648,665.58	(229,092,579.42)	200,000,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	136,576,008,734.22	17,338,796,734.22	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66,534,676,266.00	(22,978,159,734.00)	41,725,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,574,598,573.00	(12,450,751,677.00)	62,290,000.00
6	SATPOL PP	3,612,717,856.00	(2,213,440,944.00)	180,000,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	878,068,708.00	(651,931,292.00)	30,000,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,035,976,708.00	(4,961,448,292.00)	(30,000,000.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	11,226,591,708.00	(4,549,791,292.00)	193,000,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2,788,813,367.00	(6,343,946,633.00)	62,000,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20,476,971,170.00	(18,903,028,830.00)	108,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4,782,961,531.00	(8,263,975,719.00)	192,710,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,582,723,696.00	(1,532,370,695.00)	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,597,721,128.00	(2,070,323,072.00)	80,000,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	13,289,254,247.00	(4,805,288,753.00)	125,000,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,157,043,000.00	(2,983,657,000.00)	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8,628,453,708.00	(3,628,271,292.00)	83,275,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	732,766,708.00	(977,233,292.00)	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,111,760,418.00	(9,886,236,332.00)	90,000,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	7,718,651,258.00	(14,143,189,992.00)	365,000,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-
23	SETDA	37,108,128,486.00	(1,353,370,194.00)	110,000,000.00
21	SEKRETARIAT DPRD	25,114,651,440.00	(22,095,247,560.00)	(1,530,000,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	5,319,965,905.00	(2,779,432,095.00)	-
26	KECAMATAN KALIORI	708,200,600.00	(192,280,400.00)	-
27	KECAMATAN SULANG	692,074,400.00	(468,153,600.00)	-
28	KECAMATAN SUMBER	737,670,800.00	(258,027,200.00)	-
29	KECAMATAN BULU	903,823,300.00	(138,644,700.00)	-
30	KECAMATAN LASEM	979,135,008.00	27,672,128.00	-
31	KECAMATAN PANCUR	788,053,800.00	(144,449,200.00)	-
32	KECAMATAN SLUKE	787,066,000.00	(179,588,000.00)	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,152,698,400.00	(206,801,600.00)	-
34	KECAMATAN GUNEM	1,013,688,600.00	(456,377,400.00)	-
35	KECAMATAN SALE	779,728,000.00	(392,187,000.00)	-
36	KECAMATAN KRAGAN	741,870,200.00	(308,129,800.00)	-
37	KECAMATAN SEDAN	835,026,400.00	(222,698,600.00)	-
38	KECAMATAN SARANG	764,509,800.00	(345,493,200.00)	-
39	INSPEKTORAT	8,931,176,708.00	(2,295,298,192.00)	-
40	BAPPEDA	4,785,134,258.00	(3,561,403,742.00)	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11,907,774,723.00	(7,341,423,277.00)	100,000,000.00
a	(SKPD)	11,907,774,723.00	(7,341,423,277.00)	100,000,000.00
b	(PPKD)		-	-
42	BKD	4,916,454,232.00	(3,902,489,768.00)	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>684,115,244,234.80</b>	<b>(99,704,028,161.20)</b>	<b>(182,000,000.00)</b>

PROYEKSI PEMBIAYAAN RANCANGAN KUPA-PPAS PERUBAHAN 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	PEMBAHASAN		KETERANGAN
		APBD INDUK 2020	KUPA PPAS PERUBAHAN 2020	BERTAMBAH (BERKURANG)			BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7= 6-3	8 = 6-4	9	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	162,548,944,056.00	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	120,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82,548,944,056.00	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	40,143,795,817.00	(42,405,148,239.00)	-		
	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	-	80,000,000,000.00	-	-		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>162,548,944,056.00</b>	<b>120,143,795,817.00</b>	<b>(42,405,148,239.00)</b>	<b>120,143,795,817.00</b>	<b>(42,405,148,239.00)</b>	<b>-</b>		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	89,868,368,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	94,168,368,000.00	4,300,000,000.00	-		
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00	10,300,000,000.00	4,300,000,000.00	10,300,000,000.00	4,300,000,000.00	-		
3.2.3	Pembayaran pokok utang	83,868,368,000.00	83,868,368,000.00	-	83,868,368,000.00	-	-		
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>89,868,368,000.00</b>	<b>94,168,368,000.00</b>	<b>4,300,000,000.00</b>	<b>94,168,368,000.00</b>	<b>4,300,000,000.00</b>	<b>-</b>		

**V. PENUTUP**

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 3 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**BADAN ANGGARAN**

Plt. Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

**H. BISRI CHOLIL LAQOUF**

**Drs. DRUPODO, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009



Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**Drs. DRUPODO, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN ( KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 3 September 2020.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PI. KEPUA DPRD



H. BISRI CHOLIL LAQOUF





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN ( KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 3 September 2020.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Plt. KETUA DPRD

H. BISRI CHOLIL LAQOUF





**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6 / 1834 / 2020**  
**NOMOR : 019.6 / 549 / 2020**  
**TANGGAL : 3 September 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**(PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf  
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : Ridwan, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Perubahan Plafon Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 3 September 2020

**BUPATI REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. Abdul Hafidz, S.Pd.I**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**H. Bisri Cholil Laqouf**  
**Plt. KETUA**

**H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.**  
**WAKIL KETUA**



**Ridwan, S.H., M.H**  
**WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6 / 11834 / 2020**  
**NOMOR : 019.6 / 549 / 2020**  
**TANGGAL : 3 September 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**(PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf  
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : Ridwan, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Perubahan Plafon Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 3 September 2020

**BUPATI REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. Abdul Hafidz, S.Pd.I**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**H. Bisri Cholil Laqouf**  
**PIE KETUA**

**H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.**  
**WAKIL KETUA**

**Ridwan, S.H., M.H**  
**WAKIL KETUA**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6/1833 / 2020**  
**NOMOR : 019.6/5481 2020**  
**TANGGAL : 3 September 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH (KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf  
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : Ridwan, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

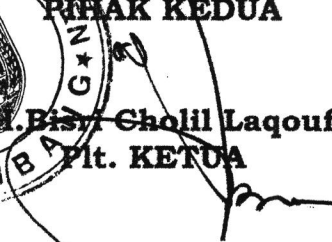
Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 3 September 2020

**BUPATI REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
H. Abdul Hafidz, S.Pd.I



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
H. Bisy Cholil Laqouf  
Plt. KETUA



H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.  
**WAKIL KETUA**

Ridwan, S.H., M.H  
**WAKIL KETUA**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6/1833 / 2020**  
**NOMOR : 019.6/ 548 / 2020**  
**TANGGAL : 3 September 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH (KUA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Bisri Cholil Laqouf  
Jabatan : Plt. Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. Supriyadi Eko Praptomo, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : Ridwan, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 3 September 2020

**BUPATI REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. Abdul Hafidz, S.Pd.I**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**H. Bisri Cholil Laqouf**  
Plt. **KETUA**

**H. Supriyadi Eko Praptono, S.E.**  
**WAKIL KETUA**



**Ridwan, S.H., M.H**  
**WAKIL KETUA**